

*Policy paper*

100 TAHUN INDUSTRI DAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

# “Saatnya Memajukan Kepentingan Nasional dan Kemakmuran Rakyat Tani”

*Jakarta, Maret 2011*



**SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)**

**2011**

2011 Serikat Petani Indonesia  
Departemen Kajian Strategis Nasional

**Writing Panel** : **Achmad Yakub**  
**Elisha Kartini Samon**

Cetakan Pertama 2011

Diterbitkan oleh:  
SERIKAT PETANI INDONESIA-SPI  
Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5  
Jakarta Selatan 12790  
Tlp;+62 21 7991890 Fax; +62 21 7993426  
website; [www.spi.or.id](http://www.spi.or.id)

# BAB I

## Pendahuluan

Hingga hari ini, Indonesia masih merupakan negara agraris dimana pertanian masih menjadi pilar penting kehidupan dan perekonomian penduduknya. Dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, lebih dari 46 persennya bekerja di sektor pertanian. Peran pertanian bukan hanya untuk menyediakan kebutuhan pangan penduduknya yang cukup besar namun juga mendominasi kegiatan ekspor negara ini.

Salah satu produksi perkebunan terbesar Indonesia saat ini ialah kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Indonesia sekarang ini memenuhi 40 persen kebutuhan konsumsi dunia.<sup>1</sup> Kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1911, dibawa oleh Adrien Hallet yang berkebangsaan Belgia. Empat pohon sawit pertama dibawa dari Congo, untuk kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor untuk melihat kecocokannya dengan iklim dan tanah di Indonesia. Hasil perkembangbiakan dari tanaman induk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perkebunan sawit pertama di Sumatra, SOCFINDO yang masih ada hingga hari ini. Benih induk dari Kebun Raya Bogor ini jugalah yang kemudian dibawa ke Malaysia, sebagai awal perkebunan kelapa sawit di Malaysia.<sup>2</sup>

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pada masa-masa awal itu relatif lambat sesungguhnya. Baru pada tahun 1980an terjadi 'booming' kelapa sawit hingga hari ini permintaan yang terus meningkat. Minyak kelapa sawit telah menjadi bahan baku yang sangat penting bagi berbagai industri makanan, kosmetik dan yang terbaru menjadi sumber energi.

Walaupun perkembangan ekonomi kelapa sawit saat ini sangat pesat, namun mencoba mencermati struktur dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia hari ini nampak bahwa struktur yang dikembangkan sejak masa kolonial relatif tidak berubah. Jika dahulu penjajah Belanda yang menguasai perkebunan-perkebunan di Indonesia hari ini perusahaan-perusahaan swasta besar yang menguasai perkebunan. Jika dahulu penduduk di Pulau Jawa dan Sumatra menjadi buruh paksa di perkebunan-perkebunan tersebut, hari ini pun masih jutaan orang menjadi buruh di perkebunan-perkebunan tersebut. Sementara 3 juta keluarga petani sawit mandiri hanya menjadi penyedia bahan baku industri dengan harga yang tidak bisa mereka tentukan.

Dengan meningkatnya ekonomi kelapa sawit ini, petani yang menggarap kelapa sawit dan buruh perkebunan tetap menjadi rantai terlemah dalam seluruh rantai perdagangan kelapa sawit. Volatilitas harga kelapa sawit membuat pendapatan tidak menentu, dan para petani tidak diberi kesempatan untuk menentukan harga jual.

---

<sup>1</sup> Colchester, Marcus, *Promised Land: palm oil and land acquisition in Indonesia – Implications for local communities and indigenous peoples*, Forest People Programme, Moreton-in-Marsh dan Sawit Watch, Bogor, 2007.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Edi Sumarno, sejarawan Universitas Sumatra Utara. Juni 2010.

Sementara itu pendapatan buruh kebun relatif tidak berubah dengan kenaikan harga.

Di tengah situasi yang seperti ini maka Serikat Petani Indonesia (SPI) memandang penting untuk memperdalam kajian mengenai ekspansi perkebunan kelapa sawit yang semakin massif. Untuk ke depannya memperdalam pandangan dan sikap organisasi terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi rakyat Indonesia, khususnya petani kecil serta menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan pangan dalam negeri.

# BAB II

## Analisa Faktor Produksi dan Kebijakan yang Mendukung Perluasan Kebun Sawit

### 1. Faktor Produksi

Sejarah kelapa sawit di Indonesia seperti telah disebutkan di bab pendahuluan bermula tahun 1911 dengan masuknya kelapa sawit dari Congo. Kelapa sawit sendiri merupakan tanaman perkebunan generasi kedua dalam masa kolonial Belanda, setelah sebelumnya perkebunan yang dikembangkan adalah tembakau, karet dan coklat. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Sumatra oleh SOCFINDO, perusahaan dari Belgia. Sejak awal sawit memang tanaman yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor, karena penduduk Indonesia pada masa itu belum memanfaatkan minyak sawit, umumnya penduduk Indonesia masih memanfaatkan minyak kelapa untuk kebutuhan sehari-hari. Daerah tujuan pemasaran minyak sawit ialah Eropa dan Amerika Serikat. Baru belakangan negara-negara Asia menjadi pasar tujuan ekspor kelapa sawit.

Peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai nampak kurang lebih 20 tahun terakhir. Dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari sebesar 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 1996 menjadi 19, 8 juta ton pada tahun 2010.

**Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2000-2010)**

| Tahun  | Areal (Ha)     |        |           |           | Produksi (Ton) |           |           |            |
|--------|----------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
|        | Petani Mandiri | Negara | Swasta    | Total     | Petani mandiri | Negara    | Swasta    | Total      |
| 2000   | 1.166.758      | 588,13 | 2.403.194 | 4.158.077 | 1.905.653      | 1.460.954 | 3.633.901 | 7.000.508  |
| 2001   | 1.561.031      | 609,95 | 2.542.457 | 4.713.435 | 2.798.032      | 1.519.289 | 4.079.151 | 8.396.472  |
| 2002   | 1.808.424      | 631,57 | 2.627.068 | 5.067.058 | 3.426.740      | 1.607.734 | 4.587.871 | 9.622.345  |
| 2003   | 1.854.394      | 662,8  | 2.766.360 | 5.283.557 | 3.517.324      | 1.750.651 | 5.172.859 | 10.440.834 |
| 2004   | 2.220.338      | 605,87 | 2.458.520 | 5.284.723 | 3.847.157      | 1.617.706 | 5.365.526 | 10.830.389 |
| 2005   | 2.356.895      | 529,85 | 2.567.068 | 5.453.817 | 4.500.769      | 1.449.254 | 5.911.592 | 11.861.615 |
| 2006   | 2.549.572      | 687,43 | 3.357.914 | 6.594.914 | 5.783.088      | 2.313.729 | 9.254.031 | 17.350.848 |
| 2007   | 2.752.172      | 606,25 | 3.408.416 | 6.766.836 | 6.358.389      | 2.117.035 | 9.189.301 | 17.664.725 |
| 2008   | 2.881.898      | 602,96 | 3.878.986 | 7.363.847 | 6.923.042      | 1.938.134 | 8.678.612 | 17.539.788 |
| 2009*  | 3.013.973      | 608,58 | 3.885.470 | 7.508.023 | 7.247.979      | 1.961.813 | 9.431.089 | 18.640.881 |
| 2010** | 3.314.663      | 616,58 | 3.893.385 | 7.824.623 | 7.774.036      | 2.089.908 | 9.980.957 | 19.884.901 |

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2010

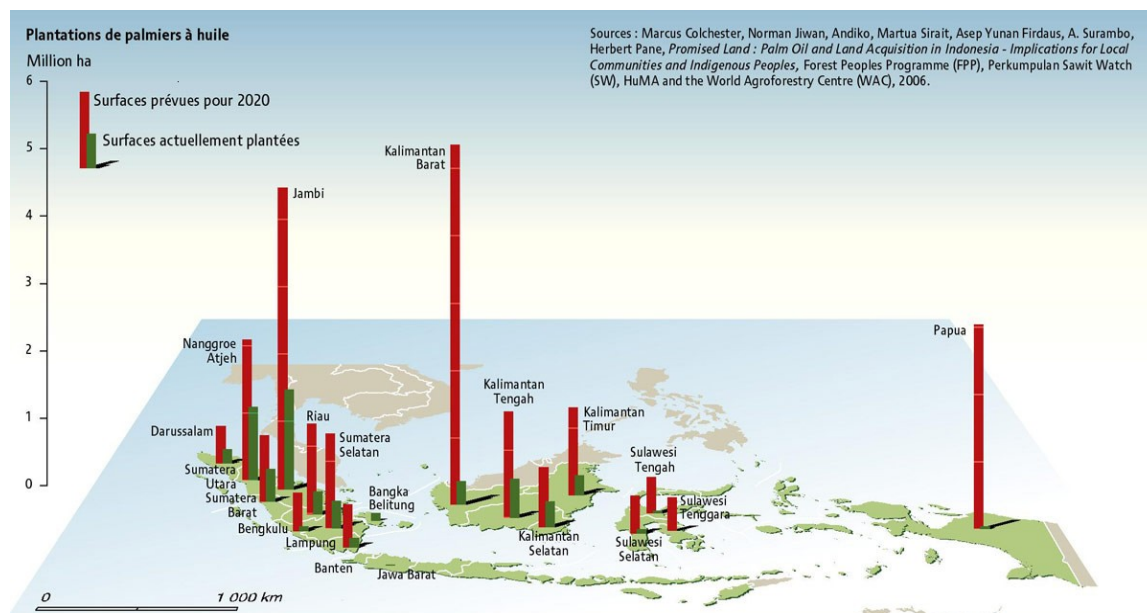
Ket: \*data pendahuluan, \*\* estimasi

Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada tahun 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan dan produksi kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional

atas minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energi.

Untuk memenuhi target produksi sebesar itu, maka pemerintah dengan gencar melakukan pembukaan areal-areal perkebunan baru, termasuk di daerah yang selama ini tidak pernah menanam sawit seperti di Sulawesi dan Papua. Gambar berikut menunjukkan dengan jelas rencana perluasan perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2020.

**Gambar 1. Rencana Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit hingga tahun 2020**



Sumber: *Le Monde Diplomatique*, 2009

Ket: grafik hijau areal perkebunan yang ada saat ini. Grafik merah rencana perluasan areal perkebunan hingga tahun 2020.

Rencana perluasan perkebunan mencapai 22 juta hektar dari total pengembangan di sejumlah propinsi seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Rencana Ekspansi Areal Perkebunan Kelapa Sawit per Propinsi**

| No | Propinsi        | Area yang ada (ha) | Rencana Perluasan (ha) |
|----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Bali            | 0                  | 0                      |
| 2  | Bangka Belitung | 138367             | 0                      |
| 3  | Banten          | 17375              | 0                      |
| 4  | Bengkulu        | 162440             | 500000                 |
| 5  | DI Yogyakarta   | 0                  | 0                      |
| 6  | DKI Jakarta     | 0                  | 0                      |
| 7  | Gorontalo       | 42032              | 0                      |

|    |                         |                  |                   |
|----|-------------------------|------------------|-------------------|
| 8  | Jambi                   | 694310           | 1000000           |
| 9  | Jawa Barat              | 10666            | 0                 |
| 10 | Jawa Tengah             | 0                | 0                 |
| 11 | Jawa Timur              | 0                | 0                 |
| 12 | Kalimantan Barat        | 434459           | 5027300           |
| 13 | Kalimantan Selatan      | 391671           | 500000            |
| 14 | Kalimantan Tengah       | 737556           | 1467100           |
| 15 | Kalimantan Timur        | 303040           | 1202000           |
| 16 | Kepulauan Riau          | 14936            | 0                 |
| 17 | Lampung                 | 164786           | 500000            |
| 18 | Maluku                  | 61590            | 0                 |
| 19 | Maluku Utara            | 0                | 0                 |
| 20 | Nangroe Aceh Darussalam | 283283           | 635000            |
| 21 | Nusa Tenggara Barat     | 0                | 0                 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur     | 0                | 0                 |
| 23 | Papua                   | 97000            | 4000000           |
| 24 | Riau                    | 1600000          | 3012300           |
| 25 | Sulawesi Selatan        | 72133            | 500000            |
| 26 | Sulawesi Tengah         | 81307            | 500000            |
| 27 | Sulawesi Tenggara       | 3602             | 700000            |
| 28 | Sulawesi Utara          | 0                | 0                 |
| 29 | Sumatera Barat          | 310281           | 500000            |
| 30 | Sumatera Selatan        | 618000           | 1000000           |
| 31 | Sumatera Utara          | 1044230          | 1079900           |
|    | <b>Total</b>            | <b>7,283,064</b> | <b>22,123,600</b> |

Sumber: SawitWatch dan lainnya, 2008

Perluasan perkebunan ini dipandang akan meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan tenaga kerja dari sektor perkebunan. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2008 perkebunan kelapa sawit mempekerjakan 3,06 juta orang dimana 3,047 juta bekerja di perkebunan besar, 308.000 di PTPN. Sementara itu terdapat 1.920.000 petani sawit skala kecil. Sedangkan dari 470 pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Indonesia, atau yang tercatat di GAPKI, mempekerjakan 63.450 orang.<sup>3</sup> Kita perlu mencermati apakah benar bahwa pembukaan perkebunan kelapa sawit akan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu faktanya menunjukkan Perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia saat ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tercatat 10 perusahaan menguasai 67 persen perkebunan sawit Indonesia, yaitu Raja Garuda Mas; Wilmar; Sinar Mas Grup; Astra Agro Lestari; London Sumatra Grup; Bakrie Grup; Guthrie (eks Salim); Socfindo Grup; Cilandra Perkasa Grup dan Kurnia Grup, melalui ratusan anak perusahaannya.

## 2. Kebijakan Publik yang Mendukung Perluasan Kelapa Sawit

Masuknya perkebunan-perkebunan besar di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang kolonialisme di negeri ini. Pada masa penjajahan Belanda dikeluarkanlah UU Agraria 1870 yang menjadi pintu masuknya modal besar swasta. Dengan sistem ini, masuklah investasi besar-besaran swasta asing (khususnya Belanda), dan

<sup>3</sup> Membangun Indonesia dengan Kelapa Sawit. GAPKI. Infosawit, Jakarta. 2009.

lahirlah sejumlah perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. Lewat UU Agraria 1870 ini pemerintah kolonial menyatakan bahwa tanah-tanah tanpa kepastian secara hukum secara otomatis menjadi milik publik (*domijn verklaring*) untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan. Hukum ini juga memungkinkan pemerintah kolonial untuk memberikan konsesi lahan (serupa dengan Hak Guna Usaha) hingga 75 tahun.<sup>4</sup>

Setelah kemerdekaan, tahun 1958 perkebunan-perkebunan Belanda dinasionalisasi dan dijadikan perusahaan negara, namun proses hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Ketika Orde Baru berkuasa, dikeluarkanlah Undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini kembali membuka pintu masuknya modal asing dengan memberikan kemudahan untuk berusaha di berbagai sektor termasuk di perkebunan. Perluasan perkebunan kemudian didorong melalui kebijakan transmigrasi pada tahun 1970an. Tahun 1980an sempat terjadi *'booming'* pembukaan lahan untuk perkebunan terutama kelapa sawit dan karet khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Dalam perkembangannya kemudian perkebunan-perkebunan skala besar banyak mendapat dukungan dari pemerintah. Menyusul dikeluarkannya Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam UU Perkebunan ini, perusahaan pengolah hasil industri perkebunan diwajibkan memiliki perkebunan sendiri untuk memastikan keberlanjutan produksi.

Tahun 2007, dikeluarkan undang-undang penanaman modal baru yang menggantikan undang-undang penanaman modal asing 1967. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini tidak membedakan antara investasi asing dan dalam negeri. Bahkan Undang-undang ini sempat memberikan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 60 tahun dengan perpanjangan dimuka selama 35 tahun, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan SPI bersama LSM dan organisasi massa lainnya.

Walaupun sejumlah perkebunan didirikan sejak masa kolonial dan sebagian pada periode awal kemerdekaan, saat ini kembali terjadi perubahan cepat dalam peningkatan perkebunan. Hal ini didorong oleh permintaan pasar internasional untuk kelapa sawit, dan akhir-akhir ini untuk agrofuel. Pemerintah pun memberikan dukungan cukup besar untuk pengembangan agrofuel di Indonesia, terutama yang berbahan baku kelapa sawit dan tebu.

**Tabel 3. Berbagai Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Agrofuel di Indonesia**

| <b>Tahun</b> | <b>Kebijakan</b>                   | <b>Peraturan Mengenai</b>   |
|--------------|------------------------------------|---|
| <b>2006</b>  | Peraturan Presiden No. 5           | Kebijakan Energi Nasional   |
|              | Instruksi Presiden No. 1           | Persyaratan dan Penggunaan <i>Agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif |
|              | Peraturan Menteri Pertanian No. 33 | Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan           |
|              | Peraturan Menteri Keuangan No. 117 | Kredit untuk pengembangan Agro-energy dan revitalisasi perkebunan         |
| 2007         | Undang-undang No. 25               | Investasi   |
|              | Peraturan Menteri Pertanian        | Petunjuk mengenai ijin perkebunan   |

<sup>4</sup> SawitWatch. 2008. Losing Ground the Human Rights Impact of Oil Palm Expansion in Indonesia



|      |   |  |
|------|---|--|
|      | No. 26  |  |
|      | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral No. 51 | Kriteria dan Petunjuk pelaksanaan untuk pedagang <i>agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif                        |
| 2008 | Keputusan Direktorat Jendral Minyak dan Gas No. 13A83   | Standardisasi dan spesifikasi mengenai biofuel jenis biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk pasar dalam negeri |

Lebih lanjut juga bisa dilihat rancangan bio diesel berbahan baku kelapa sawit hingga tahun 2010 ini sebesar 5,57 kiloliter per tahun. Jumlah ini tentu membutuhkan bahan baku kelapa sawit yang tidak sedikit. Salah satu pemicu rencana pengembangan agrofuel terutama biodiesel dari kelapa sawit terkait erat dengan dikeluarkannya Rencana Aksi dan Strategi untuk Biofuel oleh Komisi Uni Eropa pada Desember 2005. dalam rencana aksi dan strategi biofuel tersebut EU menargetkan 10 persen penggunaan biofuel sebagai sumber energi pada tahun 2020 atau sekitar 1 hingga 1,5 juta ton biofuel.

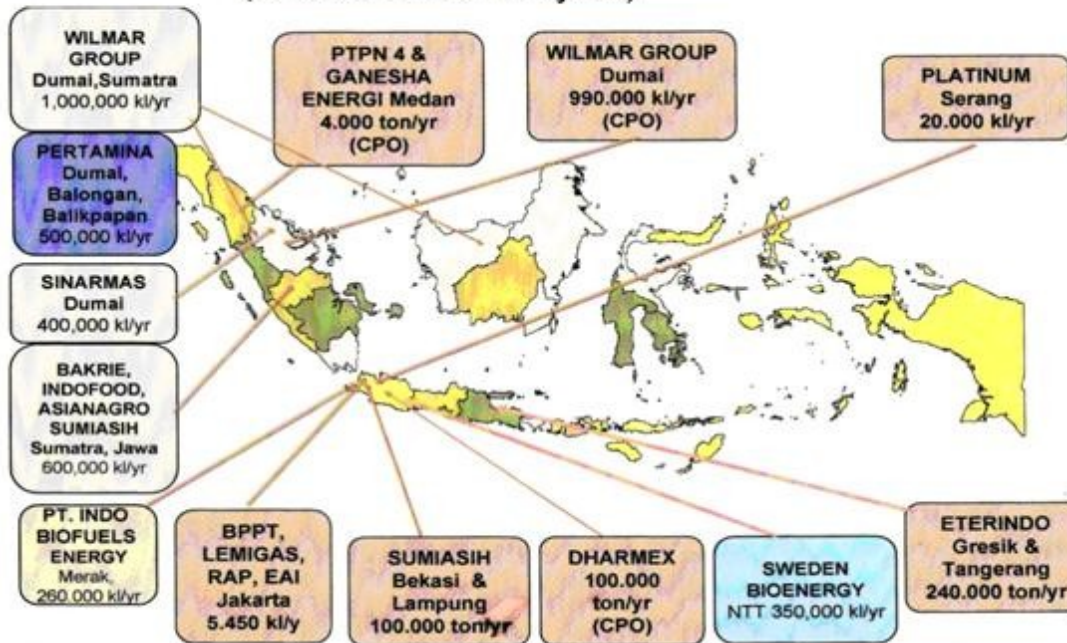
Dalam prosesnya Uni Eropa menyusun sejumlah dokumen penilaian mengenai pemanfaatan Biofuel (*Assessment of EU Commission on Biofuel*). Pada dokumen penilaian Komisi Uni Eropa menyadari bahwa target yang ditetapkan merupakan target yang ambisius dan akan membutuhkan investasi ekonomi yang signifikan.

Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk meminimalisir biaya-biaya ekonomi yang dikeluarkan dalam mencapai target tersebut. Dalam laporannya, Komisi Uni Eropa menyadari bahwa produktifitas biofuel (ethanol, biodiesel) paling tinggi di negara-negara tropis. Lebih lanjut juga disadari bahwa biaya untuk produksi biofuel lebih rendah di negara-negara berkembang. Laporan tersebut secara eksplisit menyinggung produksi biodiesel yang dilakukan oleh negara-negara seperti Malaysia, Indonesia dan Philippina, serta potensi ekspor dari negara-negara tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Communication From The Commission- An EU Strategy for Biofuels*, hal. 6

### Bio-diesel: Production plan up to 2010 (+/- 5.57 million KL/year)



Sumber: Rancangan fasilitas produksi biodiesel (INBT 2008)

### 3. Kebijakan Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit

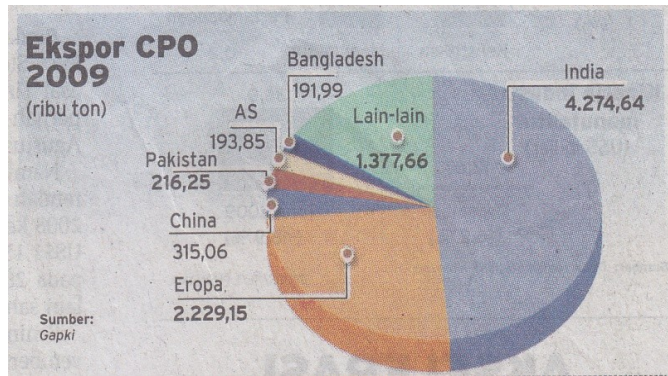
Minyak kelapa sawit mewakili 33,6 persen dari perdagangan minyak nabati di dunia, dan produksi kelapa sawit Indonesia menyumbang 44,7 persen dari perdagangan di pasar dunia tersebut. Hampir sebagian besar produk kelapa sawit memang ditujukan untuk ekspor, sebab sejak awal tanaman ini ditanam di Indonesia memang ditujukan untuk kebutuhan ekspor dengan rata-rata peningkatan volume ekspor meningkat 18 persen per tahun menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).<sup>6</sup>

Dalam periode 2008 hingga 2009 peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia baik dalam bentuk CPO maupun bentuk lainnya meningkat 2.526.574 ton, dimana saat ini terdapat 6 negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu India, Belanda, Malaysia, Italia, Bangladesh dan China, dengan pembeli CPO terbesar saat ini dari India. Total produksi kelapa sawit saat ini sebesar 80 persen ditujukan untuk ekspor, pada semester pertama tahun 2010, tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ialah India sebesar 36 persen, Uni Eropa 26 persen,

<sup>6</sup> Prospek Industri Hilir CPO Dalam Perekonomian Indonesia dan Kebijakan Industri Sawit. Sahat Sinaga. GIMNI. 2010, dalam Seminar Sinar Harapan “Memperkuat Bisnis Kelapa Sawit, Memperkokoh Masa Depan Bangsa.”

Bangladesh 19 persen dan China 13 persen.<sup>7</sup> Kondisi ini relative sama dengan ekspor tahun sebelumnya seperti bisa dilihat di grafik berikut.

**Grafik 1. Jumlah Ekspor CPO per Negara Tujuan tahun 2009**



Sumber: Bisnis Indonesia, 2010

Berikut dapat dilihat peningkatan ekspor minyak sawit mentah dalam dua tahun terakhir.

**Tabel 2. Volume Ekspor Kelapa Sawit (ton) Berdasarkan Negara Tujuan tahun 2008-2009**

|              | 2008             | 2009             | 2008             | 2009             |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belanda      | 968.205          | 786,713          | 1.063.477        | 640,556          |
| Malaysia     | 574.530          | 446,690          | 1.053.516        | 635,807          |
| Italia       | 331.236          | 260,584          | 628.521          | 361,701          |
| Bangladesh   | 102.397          | 99,271           | 93.415           | 56,086           |
| China        | 306.205          | 240,088          | 335.768          | 196,338          |
| Lainnya      | 1.750.115        | 1,433,616        | 1.948.292        | 1,176,902        |
| <b>Total</b> | <b>7.904.179</b> | <b>6,561,330</b> | <b>9.557.140</b> | <b>5,697,538</b> |

Sumber: Gapki, 2010

Hal ini menunjukkan betapa besar dan strategisnya ekonomi kelapa sawit di Indonesia. Total nilai perdagangan kelapa sawit mencapai 10.366.610.000 US\$, namun seperti diungkapkan di bagian terdahulu, 67 persen perkebunan saat ini dikuasai oleh hanya 10 perkebunan besar, melalui kurang lebih 500 anak perusahaan.

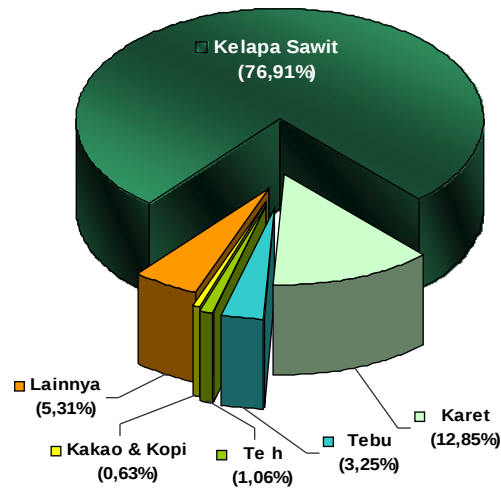
Selain itu terdapat 8 produsen benih yang mengendalikan hampir seluruh perdagangan benih sawit dalam negeri, yang terbesar diantaranya ialah PT. London Sumatra yang juga merupakan salah satu perkebunan sawit tertua di Indonesia.<sup>8</sup> Lebih lanjut sejumlah bank-bank nasional dan multinasional memberikan kemudahan pendanaan

<sup>7</sup> Alfi Fadhliyah, *The Jakarta Post*, 17 Juni 2010

<sup>8</sup> La Via Campesina. *Industrial Agrofuel*. 2009

besar bagi perkebunan kelapa sawit, dua bank yang memberikan perhatian permodalan secara khusus bagi perkebunan kelapa sawit ialah HSBC dan Bank Mandiri. Bank Mandiri bahkan hingga Mei 2010 dari Rp 32,8 triliun kredit sektor perkebunan dan industri/perdagangan 76,91 persennya untuk perkebunan kelapa sawit.

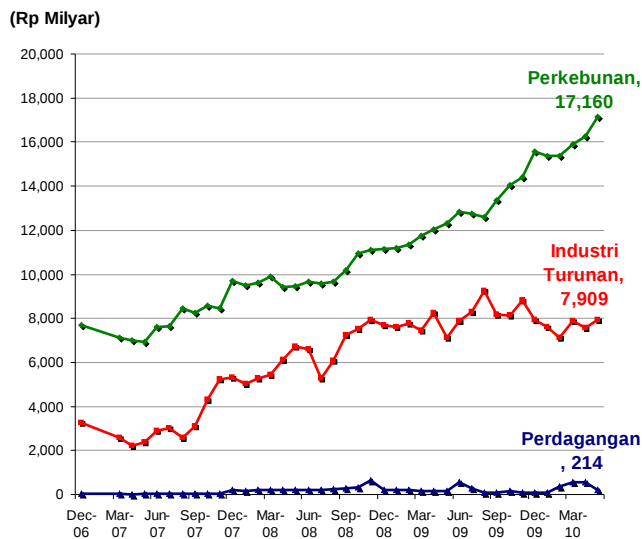
**Grafik 1. Persentase Kredit Bank Mandiri untuk Sektor Perkebunan dan Industri/Perdagangan**



Sumber: Bank Mandiri, Agustus 2010

Jumlah dana yang dikucurkan untuk kredit bagi perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya pun terus meningkat. Pada tahun 2008 dana yang disediakan bank ini sebesar Rp 19,041 triliun pada tahun 2010 ini sudah sebesar Rp 25, 283 triliun.

**Grafik 2. Pertumbuhan Kredit Kelapa Sawit**



Sumber: Bank Mandiri, Agustus 2010. Prospek Pembiayaan Kelapa Sawit dari Perspektif Perbankan.

Dari besarnya kredit perbankan yang ditujukan bagi perkebunan kelapa sawit, hampir tidak ada yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit yang berjumlah 3 juta orang. Pihak perbankan menyatakan mereka tidak berani memberikan kredit kepada petani mandiri, hal ini semakin memperbesar ketimpangan antara petani mandiri dan perkebunan kelapa sawit.

# BAB III

## Analisis Dampak Perluasan Kebun Kelapa Sawit

### 1. Dampak Sosial-Ekonomi: kemiskinan, kriminalisasi dan konflik agraria

Secara umum kita bisa melihat betapa besar dan strategisnya ekonomi kelapa sawit di Indonesia. Total nilai perdagangan kelapa sawit saat ini mencapai 10.366.610.000 US\$<sup>9</sup>. Di tengah besarnya perekonomian kelapa sawit di Indonesia bagaimanakah kondisi 3 juta keluarga petani sawit dan yang menggantungkan hidupnya dari industri ini?

Dalam studi Serikat Petani Indonesia (SPI) 2010, mencoba melihat kondisi petani dan buruh perkebunan sawit di Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi dan di 3 Kabupaten Sumatra Utara, Langkat, Asahan dan Kisaran. Di kabupaten Muara Jambi terdapat sekurangnya 6 pabrik pengolahan dan 4 perkebunan kelapa sawit, terbesar diantaranya ialah PTPN VI yang telah beroperasi sejak tahun 1987 dengan luas kebun 50.000 hektar. Di daerah ini rata-rata petani sawit adalah petani plasma dengan luas areal garapan sebesar 2-3 hektar, walaupun ada pula petani yang bisa memiliki lahan lebih dari 5 hektar, sebab awalnya sebagian besar mereka adalah transmigran yang mengikuti program PIR-SUS pada periode tahun 1980an hingga pertengahan tahun 1990an. Dengan lahan garapan sebesar 2-3 hektar itu petani sawit, seperti yang diungkapkan anggota SPI di basis Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi bisa mendapatkan hasil panen rata-rata 1,5-2 ton tandan buah segar (TBS) setiap dua minggu nya. Dengan harga jual yang sangat cepat berubah, perubahan harga terjadi setiap dua minggu sekali. Walaupun petani memperoleh informasi mengenai perubahan harga ini, khususnya mereka yang menjual melalui Koperasi Unit Desa (KUD), namun para petani tidak mempunyai andil dalam penentuan harga sama sekali.

Perbedaan harga pun bisa terjadi antar KUD apalagi jika petani menjual melalui tengkulak atau pengumpul. Pada periode Oktober 2010 misalnya harga per kilogram TBS di Sungai Bahar, Kab. Muara Jambi ini pun bervariasi cukup tinggi, dari harga terendah yang diterima sebesar Rp 850 per kilogram hingga harga tertinggi pada periode ini sebesar Rp 1470 per kilogram. Menurut Sugito, mantan Kepala Sub Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari penentuan harga TBS di tingkat petani sangat tergantung pada harga jual minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil-CPO*) di pasar internasional, dari situ kemudian harga ditentukan lagi berdasarkan rendemen minyak yang bisa diperoleh dari TBS tergantung usia tanaman.

Bagi petani kelapa sawit dengan kepemilikan lahan 2-3 hektar rata-rata per bulan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000- Rp 5.000.000 per bulan dengan harga jual TBS per kilogram antara Rp 1200-1400, bahkan ada yang hanya mendapat Rp 850 per kg nya.<sup>10</sup> Dari jumlah tersebut bagi petani plasma umumnya dikenakan potongan 30 persen untuk membayar kredit lahan, pembayaran bibit, pupuk ataupun perawatan infrastruktur.

<sup>9</sup> Palm Oil in Numbers 2010. GAPKI

<sup>10</sup> Harga TBS di Kab. Muara Jambi pada periode Oktober 2010

Namun demikian fluktuasi harga TBS yang cukup tinggi, cukup menyulitkan petani untuk bisa memastikan keuntungan yang diperoleh. Bagi petani yang menjual produksinya ke tengkulak, harga TBS per kilogram yang diterima bisa lebih rendah 50 persen dari yang ditetapkan perusahaan.

Sementara bagi buruh perkebunan kondisi mereka jauh lebih sulit. Para buruh perkebunan di daerah Sungai Bahar, Jambi mendapat upah rata-rata Rp 23.000 per hari dengan jam kerja yang cukup panjang dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.30 sore, jika mereka bekerja 6 hari dalam seminggu maka pendapatan mereka per bulan sebesar Rp 552.000, jauh di bawah upah minimum Propinsi Jambi sebesar Rp 900.000<sup>11</sup>. Namun sebagai buruh harian lepas, mereka sulit untuk memastikan apakah mereka bisa bekerja setiap hari. Buruh-buruh harian ini umumnya bertugas membersihkan gulma dengan menyemprot herbisida atau membersihkan batang-batang sawit yang sudah tua. Mereka pun harus memenuhi target yang cukup tinggi yaitu 40 batang sawit per harinya, jika tidak bisa memenuhi target tersebut maka mereka tidak akan dipakai lagi oleh pihak perkebunan. Resiko yang dihadapi buruh perkebunan pun cukup tinggi, seperti tertimpa buah sawit yang jatuh yang beratnya bisa mencapai 60 kg per tandan tanpa ada asuransi atau perlindungan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Jika kita bandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit tentu kerja keras para petani dan buruh perkebunan sawit ini sangat tidak sebanding. Sebagai contoh PTPN VI yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Jambi, dengan luas kebun yang ditanami seluas 19.434 hektar dan 4 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan CPO sebesar 150 ton per jam nya, bisa memproduksi 75.543 ton CPO per bulan yang seluruhnya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan harga jual CPO di pasar internasional saat ini rata-rata 600US\$<sup>12</sup> per tonnya maka PTPN VI bisa memperoleh 45.325.000 US\$ per bulannya. Dari proses pengolahan TBS menjadi CPO terjadi peningkatan 4,76 kali lipat harga yang diperoleh.

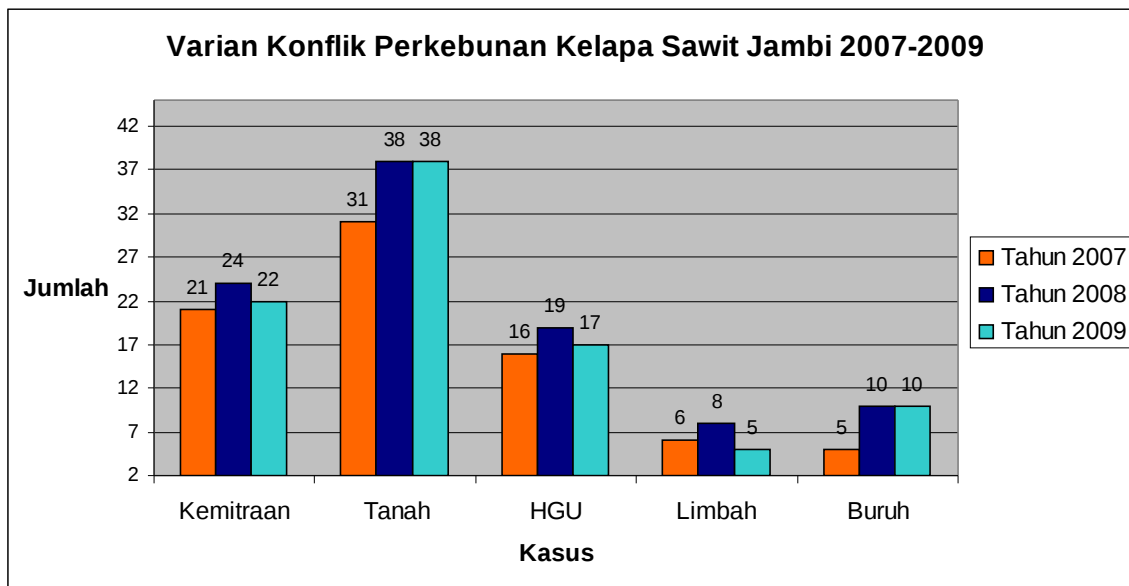
Hal ini menjadi gambaran bagi kita besarnya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini. Keadaan yang tidak adil inilah yang seringkali menimbulkan konflik antara pihak perkebunan atau perusahaan dengan petani sekitar atau buruh perkebunan. Tercatat pada periode tahun 2007-2009 terjadi peningkatan konflik dengan pihak perkebunan, terutama mengenai masalah tanah dan kemitraan, seperti petani plasma yang tidak memperoleh tanahnya walaupun telah membayar kredit kepada pihak perkebunan. Di bawah ini bisa dilihat grafik konflik perkebunan di Jambi.

---

<sup>11</sup> Kompas, 22 November 2009

<sup>12</sup> GAPKI, Indonesia Palm Oil in Number 2010

**Grafik 3. Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi tahun 2007-2009**



Sumber: Yayasan SETARA, 2010

Sementara itu di Sumatra Utara, harga TBS yang diterima petani sawit mandiri lebih tinggi dibandingkan di Jambi antara Rp 1250 hingga Rp 1650 per kg nya. Hal ini dipengaruhi oleh koperasi-koperasi petani yang sudah lebih kuat di Sumatera Utara menyebabkan posisi tawar petani relatif lebih kuat. Selain itu di 3 kabupaten yang didatangi SPI, umumnya petani sawit yang ada bukan petani plasma yang terikat pada kebun inti.

Pendapatan buruh kebun sawit di Sumatra Utara pun relatif lebih tinggi antara Rp 16.000 hingga Rp 35.000 per hari untuk 8 jam kerja, namun jumlah ini pun masih di bawah upah minimum provinsi Sumatra Utara sebesar Rp 965.000. Di Sumatra Utara seperti juga di Jambi sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan pangan. Dimana 80 persen dari petani dan buruh perkebunan menyatakan pengeluaran terbesar mereka adalah untuk pangan, hal ini mengingatkan bahwa seluruh kebutuhan pangan mereka harus didatangkan dari tempat yang cukup jauh.

Saat ini buruh kehilangan jaminan-jaminan sosial klasik yang pernah diterapkan seperti catu 11, dan terdegradasi menjadi buruh kontrak, hingga outsourcing, yang tidak memiliki jaminan sosial dari perkebunan-perkebunan. Diperkirakan, dari 236.000 buruh di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, terdapat setidaknya 80.000 buruh harian lepas (BHL), yang bergaji cash kurang dari 2 euro per hari, tanpa tambahan jaminan sosial lainnya. Selain itu, diperkirakan terdapat 68.000 orang buruh ‘pengutip brondolan’ atau dikenal dengan istilah kernet yang bergaji hanya sekitar 1 euro per hari. Kondisi buruk ini masih berlangsung di perkebunan perkebunan tua yang sering disebut sebagai ‘benchmark’ seperti PT Socfindo, PT Tolan Tiga- Sipef Group, PTPN III, dan PT GDLP-SLJ, yang berhubungan dengan PT BSP. Jika di perkebunan yang disebut sebagai ‘benchmark’, kondisi buruh memprihatinkan, apalagi dipuluhan perkebunan-perkebunan lainnya di Labuhan Batu.



Sementara itu di kabupaten Asahan, Langkat dan Kisaran saja masih terdapat 2.560 hektar tanah perkebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan masyarakat sekitar. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Umumny konflik-konflik ini terkait dengan ketidak jelasan HGU perusahaan dengan tanah masyarakat.

**Tabel 3. Konflik dengan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan, Langkat dan Kisaran, Propinsi Sumatera Utara**

| Konflik Masyarakat dengan   | Lokasi                            | Luas Areal   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| PT. Jaya Baru               | Kec. Bandar Pasir Mandoge, Asahan | 600 hektar   |
| Bakrie Sumatra Plantation   | Kec. Bandar Pasir Mandoge, Asahan | 220 hektar   |
| PT Asian Agri Gunung Melayu | Kec. Bandar Pulo, Asahan          | 1200 hektar  |
| PTPN II                     | Kec Wampu, Langkat                | 540 hektar   |
|                             | Total                             | 2.560 hektar |

Sumber: SPI Sumatera Utara, 2010

Dari monitoring yang dilakukan di Sumatera Utara selama Januari hingga desember 2010, terdapat 26 kasus berupa peristiwa yang berkaitan dengan perkebunan sawit di Sumatera Utara, yang terdiri dari pengusuran, intimidasi, pembunuhan, kekerasan, penangkapan, kriminalisasi, dan pemenjaraan. Dari daftar kasus yang berhubungan dengan perkebunan Sawit tersebut, menurut 4 koran pada tahun 2010 (Media Kompas, Medan Bisnis, Pos Metro, SIB), tercatat 26 kasus pengusuran petani yang berkaitan dengan perkebunan sawit. Dari 26 kasus yang diberitakan ini, hanya 2 media yang merinci jumlah korban, yakni sebanyak 909 kk. Dampak pengusuran, sebanyak 2 orang tewas (Yusuf Tarigan, konflik dengan PTPN II Limau Mungkur, Tj Morawa, dan Desman Sianipar, konflik dengan PT SLJ, Labuhan Batu Utara), 5 orang mengalami kekerasan dan penangkapan, sementara puluhan mengalami penahanan.

Pengusuran terhadap kelompok tani atau pelanggaran hak asasi terhadap kelompok (tidak termasuk pelanggaran terhadap individual) menjadi perhatian Perhimpunan Bakumsu tahun 2007. Dari dokumen yang dikumpulkan Perhimpunan Bakumsu tahun 2007 dari tujuh Organisasi Non Pemerintah<sup>13</sup> yang menangani konflik tanah di 9 kabupaten/kota, yakni kabupaten Deli Serdang, Langkat, Labuhan Batu, Simalungun, Asahan, Tapsel, Tobasa kota Medan dan Dairi, terdapat 97 kasus konflik kelompok tani versus perkebunan dan perusahaan kayu di lahan seluas 32.504,76 HA. Sebanyak 58 kasus atau 60 % kelompok tani berkonflik dengan perkebunan sawit, 29 % berkonflik dengan Perusahaan, sisanya berkonflik dengan TNI dan Kelompok masyarakat. Dengan demikian, 97 kelompok tani yang seluruhnya beranggotakan total 29.774 kk, potensial

<sup>13</sup> Sumber data diperoleh Bakumsu dari mitra kerjanya di Sumatera Utara, yakni KPS, KSPPM, Lentera, Bitra, PBHI Sumut, Kontras, dan LBH Medan tahun 2006-2007.

menjadi petani tak bertanah dan kehilangan akses terhadap sumber daya di Sumatera Utara karena digusur oleh kehadiran perkebunan sawit dan perusahaan lainnya.

Dari data yang sama, khusus di Labuhan Batu (sebelum dipecah menjadi 3 kabupaten), terdapat 20 kasus penggusuran kelompok tani, dimana seluruhnya atau 100 % adalah kasus konflik tanah antara kelompok tani dengan perusahaan perkebunan sawit. Total luas lahan konflik seluas 6.943,98 HA dengan jumlah anggota kelompok tani sebanyak 5.298 KK melawan 17 perusahaan perkebunan sawit skala besar.

Secara nasional Sawit Watch mencatat, konflik yang berhubungan dengan perkebunan sawit di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Konflik tanah yang berhubungan dengan perkebunan sawit, dan masih berlangsung (belum ada jalan keluar) tercatat sebanyak 576 kasus antara kelompok masyarakat dan perusahaan perkebunan<sup>14</sup>, dimana sebanyak 13 konflik berada di Sumatera Utara. Data yang terlalu sedikit ini tentu bisa dipertanyakan, karena hanya di satu kabupaten saja, seperti Labuhan Batu, terdapat 20 konflik antara petani versus perkebunan yang masih terus berlangsung. Konflik warisan masa lalu ini berhubungan pada umumnya dengan pengabaian hak masyarakat lokal atas tanah, juga karena ganti rugi yang tidak layak, dan masalah warisan skema PIR (Perkebunan Inti Rakyat)

Belum lagi masalah sosial yang diakibatkan oleh masifnya promosi dan pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit, masyarakat tani di daerah perkebunan untuk konsumsi harian semuanya harus membeli. Tidak ada lagi yang namanya tanaman pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan sosial masyarakat pendekatannya adalah kapital, memudarnya solidaritas sosial. Pola konsumsi juga berubah menjadi lebih konsumtif<sup>15</sup>.

## **2. Dampak bagi Kedaulatan Pangan**

Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran saat ini di tengah tingginya permintaan pasar internasional juga menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan. Di Propinsi Jambi ini misalnya luas perkebunan kelapa sawit saat ini sudah 819.237 hektar, 8 kali lipat luas lahan sawah yang tinggal 143,034 hektar. Pada periode 2008-2010 terjadi alih fungsi lahan pangan seluas 75.560 hektar di propinsi ini, alih fungsi terbesar terjadi di wilayah transmigrasi (Trans-PIR) dimana lahan peruntukan tanaman pangan seluas 60.000 hektar seluruhnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini menempatkan Jambi sebagai titik rawan pangan prioritas pertama.<sup>16</sup>

Akibat alih fungsi lahan sawah ini Propinsi Jambi hanya mampu memenuhi 11,7 persen kebutuhan berasnya sendiri atau sebesar 350 ton per tahun dari kebutuhan minimal 3.000 ton per tahun.<sup>17</sup> Untuk memenuhi

---

<sup>14</sup> Sawit Watch, 2009

<sup>15</sup> Achmad Yakub, 2008, seperti yang disampaikan langsung oleh petani Jambi.

<sup>16</sup> Kompas, 19 Juli 2010.

<sup>17</sup> Bulog Divisi Jambi, 2010 dalam Hearing Bersama Komisi III DPRD Prov. Jambi oleh Yayasan Setara

kebutuhan propinsi, Jambi terpaksa mengimpor beras dari propinsi-propinsi lain seperti Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Situasi ini pun juga bisa dilihat pada rumah tangga petani sawit. Mereka harus membeli seluruh kebutuhan pangan sehari-hari mereka, termasuk membeli air kemasan untuk minum karena sumber air di sekitar perkebunan umumnya tidak bisa untuk air minum. Air sumur hanya bisa dimanfaatkan untuk mandi, dan mencuci. Dan pengeluaran untuk pangan ini menyedot hampir 70 persen dari pendapatan mereka setiap bulannya.

Di Sumatra Utara, luasan lahan pangan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 misalnya tercatat 278.560 hektar lahan pertanian pangan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini berpengaruh pada penurunan produksi padi di Sumatra Utara yang rata-rata pertahun penurunan produksi mencapai 23 persen. Sementara itu rata-rata 65 persen pengeluaran rumah tangga petani sawit habis untuk membeli kebutuhan pangan.

Demikian juga dengan halnya semakin sempitnya lahan pertanian akibat ekspansi lahan sawit yang terjadi di beberapa daerah. Contoh kasus bisa di lihat pada daerah Delta Upang dan Delta Telang II di Banyu Asin, Sumatera Selatan dimana daerah ini semenjak tahun 1969 merupakan daerah penghasil pangan dan penyumbang 50 % beras bagi Sumatera Selatan, setelah pembukaan akses jalan tahun 2000 tanah diserobot oleh investor sawit. Contoh kasus alih fungsi lahan lainnya di Kab. Pasaman Barat Sumbar, sebelum tahun 1990 daerah ini termasuk sentra produksi beras dengan luas sawah tidak kurang dari 27.168 hektar, terjadi penurunan luas sawah seiring masuknya perkebunan kelapa sawit (mulai 1981). Pada tahun 2005 luas sawah di Pasaman Barat tercatat 16.127 H, dalam periode tahun 2005-2007 terjadi penurunan komulatif sejumlah 1.287 H, hingga sawah yang tersisa di tahun 2007 seluas 14.840 H (BPS 2008) dan 4.953 diantaranya di tanami tanaman jagung. Menurut Dinas Pertanian Pesisir Selatan/Sumbar (Padang Today 2/4/2009) sekitar 1.293 hektar sawah di Pesisir Selatan juga berkurang dalam lima tahun terakhir akibat alih fungsi menjadi perkebunan dan perumahan, sawah yang tersisa hanya 30.466 H dengan kepemilikan lahan 0.5 ha per-rumah tangga petani.<sup>18</sup>

Kenaikan luas dan kelimpahan produksi dari kelapa sawit apakah menjamin ketahanan pangan dinasional? Tidak. Secara mudah kita cermati saat harga CPO naik, perusahaan berlomba untuk meng-ekspor, sementara harga yang ditanggung rakyat banyak untuk kebutuhan minyak goreng terus naik. Pada Mei 2007, harga minyak goreng curah naik dari Rp 5.500 per kg menjadi Rp 8.000 per kg. Pada April 2008, harga minyak goreng sudah mencapai Rp 13.000 per kg sampai Rp 14.000 per kg<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> <http://www.spi.or.id/?p=3047>

<sup>19</sup> Masuknya berbagai produk pangan dan perkebunan ke stock exchange dangat mudah bagi kita untuk mendeteksi kenaikan dan penurunan harga. Hal inilah salah satu pemicu ketidakstabilan harga dan awal dari rusaknya ekonomi pertanian, segala hal sifanya menjadi spekulasi.

### 3. Dampak Lingkungan

Secara umum kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu industri kayu dan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Saat ini di Indonesia terdapat 133 juta hektar hutan, dimana 20,3 juta hektar merupakan hutan konservasi, 33,3 juta hektar hutan lindung, 59,2 juta hektar hutan produksi dan 22,8 juta hektar hutan produksi terbatas (Kementrian Kehutanan, 2008). Saat ini alih fungsi dan pembakaran hutan menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara-negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar. Menurut Departemen Kehutanan proyeksi deforestasi di Indonesia tahun 2010 ini sebesar 1,125 juta hektar, dimana konversi terbesar untuk perkebunan kelapa sawit.

**Tabel 4. Laju Deforestasi di Indonesia**

| <b>Laju Deforestasi<br/>(Juta hektar)</b> | <b>1990-1996</b> | <b>1996-2000</b> | <b>2000-2003</b> | <b>2003-2006</b> | <b>Proyeksi 2010</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Seluruh Indonesia</b>                  | <b>1.87</b>      | <b>3.51</b>      | <b>1.08</b>      | <b>1.17</b>      | <b>1.125</b>         |
| <b>Di dalam Kawasan<br/>Hutan</b>         | <b>1.37</b>      | <b>2.83</b>      | <b>0.78</b>      | <b>0.76</b>      | <b>0.770</b>         |
| <b>Di luar Kawasan<br/>Hutan</b>          | <b>0.50</b>      | <b>0.68</b>      | <b>0.30</b>      | <b>0.41</b>      | <b>0.355</b>         |

Sumber: Kementrian Kehutanan, 2008

Dari pengalaman masa lalu juga terungkap bahwa semakin meluasnya lahan kritis di Kalimantan Timur salah satunya diakibatkan oleh pembukaan areal hutan dengan perijinan kelapa sawit yang akhirnya tidak dilakukan penanaman. Hanya 6,7% perkebunan besar kelapa sawit yang melakukan penanaman kelapa sawit, selebihnya hanya mengambil kayu dan meninggalkan lahan kritis. Tak kurang dari 3,5 juta hektar lahan kritis di Kaltim saat ini yang ditinggalkan dan tak menjadi prioritas dalam pengelolaannya.<sup>20</sup>

Selain kerusakan lingkungan akibat deforestasi, perkebunan-perkebunan kelapa sawit pun menghancurkan sumber air tanah. Dengan daya serap air per batang sawit dewasa (usia > 5 tahun) rata-rata 20 liter per hari bisa kita bayangkan besarnya banyaknya air tanah yang hilang dari jutaan hektar kebun kelapa sawit. Hal ini menyebabkan sulitnya tanaman lain untuk tumbuh dan berkembang di sekitar kebun kelapa sawit, dan juga menghilangkan sumber air minum bagi penduduk sekitar.

<sup>20</sup> Memimpikan Kesejahteraan dari kelapa sawit <http://timpakul.hijaubiru.org/sawit-11.html>, 2006

# BAB IV

## Penutup dan Rekomendasi

Pengembangan perkebunan dengan orientasi ekspor dan ketergantungan yang sangat besar pada pasar internasional membuat petani sawit bahkan perusahaan sawit akan terus fluktuasi harga. Petani sawit hanya akan terus menjadi buruh penghasil bahan mentah yang tidak memiliki kepastian. Ketika harga CPO meningkat petani diiming-imingi keuntungan besar untuk menanam sawit bagi industri walau keuntungan yang diterima lebih banyak diserap oleh perusahaan sawit. Kemudian saat harga jatuh petani lah yang paling pertama ditekan agar industri tidak terlalu merugi, petani selalu menjadi obyek. Pada tahun 2010 tidak adanya pengembangan industri hilir yang dikelola oleh negara dan menempatkan posisi petani sebagai subjek maka petani sawit hanya akan terus menjadi buruh di tanahnya sendiri. Dan harga turunan produk sawit yang diproduksi oleh perusahaan akan terus memenuhi pasar LN daripada dalam negeri. Perluasan perkebunan sawit yang telah merusak dan merampas sumber alam yang secara turun temurun dikelola keluarga tani membuat petani tidak memiliki pilihan dan terseret ke dalam rantai industri perkebunan sawit. Jika pemberian ijin perluasan perkebunan ataupun *food estate* tidak segera dihentikan maka lahan-lahan pertanian yang subur akan menghilang menjadi gurun hijau. Akibatnya konflik-konflik baru diperkebunan akan semakin marak terjadi, konversi lahan hutan, gambut maupun pertanian pangan juga semakin meluas. Terkait pangan ke depan bukan hanya petani namun rakyat secara keseluruhan akan kesulitan memperoleh pangan jika hal ini dibiarkan. Tahun-tahun mendatang konflik diperkebunan sawit terus akan terjadi, mengingat tahun 2010 belum ada penyelesaian konflik yang signifikan disektor perkebunan. Demikian juga persoalan lingkungan, kedaulatan pangan bangsa yang semakin hari mengkwatirkan.

Demikian juga sekarang ini menurut BPS (2010) masih ada 31.2 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi orang miskin desa lebih banyak yakni 19,93 juta penduduk dan 11.1 juta penduduk kota. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebenarnya bisa disetarakan dengan jumlah petani gurem, karena mereka inilan kelompok yang rentan. Menurut katagori BPS petani gurem adalah Petani yang tanah garapan kurang dari 0.5 ha. Hasil Sensus Pertanian terakhir (2003) menunjukkan bahwa jumlah keluarga petani gurem berjumlah 13.7 juta jiwa dan hasil proyeksi SPI jumlah keluarga petani gurem pada tahun 2008 berjumlah 15.6 juta jiwa. Bila setiap KK mempunyai 3 anak saja, maka jumlah penduduk miskin berjumlah 78 juta jiwa. Pada tahun 2010 jumlah petani tersebut diperkirakan akan meningkat, seiring dengan agenda korporatisasi pangan dan pertanian pemerintah melalui investor dan perusahaan-perusahaan agribisnis.

Dari kertas kebijakan ini, Serikat Petani Indonesia maka kami mendesak adanya;

**Pertama**, perlunya langkah strategis untuk memorandum pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, ini terkait dengan evaluasi atas ancaman kedaulatan pangan, lapangan kerja, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria.

**Kedua**, perlunya merestrukturalisasi kepemilikan, peruntukan (tata ruang) dan pemanfaatan hasil kelapa sawit. Agar kepetingan rakyat lebih diutamakan dibanding kepentingan korporat.

**Ketiga**, Pembatasan luas perusahaan perkebunan baik berdiri sendiri maupun secara *holding company*, agar tidak adanya konsentrasi kepemilikan lahan-lahan secara luas pada segelintir pihak, baik perusahaan maupun individu.

**Keempat**, Penataan wilayah yang jelas bagi kawasan perkebunan untuk mencegah adanya alih fungsi lahan-lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga tentunya membutuhkan insentif bagi petani tanaman pangan dengan menjamin harga tidak jatuh dibawah biaya produksi untuk mencegah petani tanaman pangan beralih menjadi petani-petani sawit. Dengan demikian juga mengembangkan model perkebunan berkelanjutan yang berbasis keluarga tani.

**Kelima**, kebijakan nasional untuk pemenuhan kebutuhan nasional akan minyak sawit sebelum izin ekspor, sejenis *public service obligation* bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Pemenuhan kebutuhan nasional ini diperuntukan bagi kedaulatan pangan dan energi.

**Keenam**, pengolahan TBS menjadi minyak sawit mentah skala mini melalui koperasi-koperasi petani menjadi suatu pilihan yang memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. Dengan mesin pengolah berkapasitas 100-300 ton per hari (2000ha), kelompok-kelompok petani kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan mereka cukup tinggi dari lahan yang terbatas, dan mereka pun lebih memiliki kepastian harga yang jelas dibandingkan dengan hanya menjual dalam bentuk bahan mentah (TBS).

**Ketujuh**, untuk kebutuhan energi nasional, melalui Dewan Energi Nasional yang ketuanya adalah Presiden, merumuskan strategi pemenuhan energi yang terdistribusi di tiap-tiap wilayah Indonesia sesuai potensi yang ada. Terkait dengan kelapa sawit, daerah surplus diarahkan untuk menggunakannya sebagai pemenuhan energi lokal seperti tingkat kabupaten, provinsi maupun kawasan, jadi tidak untuk ekspor semata.

**Delapan**, tentu Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merupakan kunci bagi tercapainya kedaulatan pangan, energi, pembukaan lapangan kerja, memerangi kemiskinan dan kelaparan. Demikian juga diperlukannya Komite Ad hoc penyelesaian konflik agraria secara nasional.

Demikian policy paper ini dibuat. Semoga pembangunan pertanian, perdesaan dan pembaruan agraria menjadi landasan utama bagi bangsa ini. Demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan konstitusi UUD 1945 terutama pembukaan dan pasal 33.

#selesai.

#### **Kontak lebih lanjut:**

Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)-0811655668

Achmad Yakub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI -0817712347

## Daftar Pustaka

- Colchester, Marcus. 2007. *Promised Land: palm oil and land acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities And Indigenous Peoples*. Forest People Programme, Moreton-in-Marsh dan Sawit Watch. Bogor
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2010. Kementrian Pertanian. Jakarta
- EU Commission. *Communication From The Commission- An EU Strategy for Biofuels*. 2006
- Fadliyah, Alfi. *The Jakarta Post*, 17 Juni 2010
- GAPKI. 2009. *Membangun Indonesia dengan Kelapa Sawit*. Infosawit, Jakarta
- GAPKI. 2010. *Palm Oil in Numbers 2010*. Jakarta
- GAPKI. 2010. *Indonesian Palm Oil in Number 2010*. Jakarta
- Houtart, F. 2010. *Les impacts de l'expansion des agrocarburants en Indonésie*. CETRI. Belgium
- SawitWatch. 2008. *Losing Ground the Human Rights Impact of Oil Palm Expansion in Indonesia*. Bogor
- Sumarno, Edi. 2010. Dosen Universitas Sumatra Utara, Wawancara oleh SPI. Medan
- Via Campesina, *Industrial Agrofuels Fuel Hunger and poverty*, Notebook N°1, Jakarta, 2009
- Yakub, Achmad Dampak Makro Produksi Agrofuel di Indonesia, untuk FGD dengan Sawit Watch Jakarta 10 Desember 2008.